

STRATEGI PENDIDIKAN BELANDA PADA MASA KOLONIAL DI INDONESIA

Sangkot Nasution
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara

Abstrak: Tujuan dari sekolah yang didirikan oleh Zending adalah untuk mendidik murid-murid menjadi guru dan mereka ini diberikan pengajaran umum, dan untuk mendidik murid-murid menjadi pendeta khusus dalam bidang agama. Pada abad ke 20 sistem pendidikan di Indonesia pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu : 1. Pendidikan Barat yang diberikan oleh Belanda untuk anak-anak Eropa. 2. Pendidikan pribumi yang diberikan untuk anak-anak pribumi dengan memasukkan system Eropa. 3. Pendidikan Islam yang terpisah dari pendidikan Belanda.

Kata kunci : Pendidikan Belanda, Masa Kolonial.

I. Pendahuluan

Kompani sebagai suatu badan persekutuan dagang tidak mencampuri urusan sosial dan pemerintahan. (Algemen Verslag, 10) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sepenuhnya dilaksanakan oleh Zending. Tujuan dari sekolah yang didirikan oleh Zending adalah untuk mendidik murid-murid menjadi guru dan mereka ini diberikan pengajaran umum, dan untuk mendidik murid-murid menjadi pendeta khusus dalam bidang agama. Dengan demikian, ada pemisahan sekolah sesuai dengan fungsinya didalam masyarakat. Walaupun ada pemisahan akan tetapi materi pelajaran disekolah umum tetap berhubungan dengan masalah agama, misalnya membaca dari buku Bibel, pelajaran sejarah juga yang berhubungan dengan nabi-nabi. Pengetahuan keterampilan tidak diberikan, bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. (Algemen Verslag, 10).

Sebenarnya aktifitas Zending terutama dikepulauan Maluku adalah merupakan usaha lanjutan yang telah dirintis oleh misi Katolik sewaktu Portugis berkuasa di daerah itu, dan masyarakat telah banyak memeluk agama Kristen. Sedangkan di daerah lain, Zending melaksanakan usaha social khusus dibidang pendidikan hanyalah di Jawa yaitu Jakarta, Depok, Tugu.

Sedangkan di luar daerah yang telah disebut tadi pengembangan pendidikan dan pengajaran pada umumnya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan surau. Pengetahuan yang diberikan juga bersifat keagamaan dan juga tidak memberikan pengetahuan keterampilan.

Dengan tidak adanya perhatian Kompani pada masalah pendidikan masyarakat, maka peran kedua badan keagamaan yang tersebut diatas cukup penting pada masa itu. Kemudian pada akhir abad ke 19, setelah pemerintah Belanda memberikan perhatiannya terhadap masalah pendidikan, maka kedua lembaga keagamaan itu berperan sebagai pembantu dalam mengembangkan pendidikan masyarakat.

Pada abad ke 20 sistem pendidikan di Indonesia pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu : 1. Pendidikan Barat yang diberikan oleh Belanda untuk anak-anak Eropa. 2. Pendidikan pribumi yang diberikan untuk anak-anak pribumi dengan memasukkan system Eropa. 3. Pendidikan Islam yang terpisah dari pendidikan Belanda.

II. Pendidikan Untuk Anak-anak Eropa Dan Pribumi

1. Pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak Eropa

Untuk anak-anak Eropa, ada tiga tingkat sekolah dasar yang dinamakan E.L.S. (*Europeesche Lagere School*) lama belajar enam tahun. Didirikan di Jakarta pada tahun 1816. Kemudian disekitar tahun 1900-1940 perkembangan jumlah sekolah dan murid tidak mengalami perkembangan yang berarti, akan tetapi setelah tahun 1900 jumlah anak-anak pribumi yang memasuki E.L.S. meningkat.

Kemudian jenis kedua adalah sekolah menengah. Sekolah menengah terdiri dari H.B.S. (*Hooger Burger School*) lima tahun dan H.B.S. tiga tahun. Sekolah ini didirikan pada tahun 1867 di Jakarta. Sebelumnya telah ada Gymnasium enam tahun didirikan pada tahun 1860 di Jakarta yang diberi nama Gymnasium III. Tamatan H.B.S. lima tahun dapat melanjutkan ke Universitas, dan H.B.S. tiga tahun ke sekolah kejuruan atau dapat juga ke H.B.S. lima tahun di kelas IV.

Dalam tahun 1903 didirikan sekolah M.U.L.O. tiga tahun dan dianggap sederajat dengan H.B.S. tiga tahun. Tamatan M.U.L.O. dapat melanjutkan ke H.B.S. lima tahun di kelas IV. Baik H.B.S. tiga tahun maupun M.U.L.O. sebenarnya dipersiapkan untuk memasuki sekolah kejuruan. Pemilik ijazah M.U.L.O. mempunyai arti penting karena mendapat posisi yang baik di dalam masyarakat. (Creutsberg, 32)

Kemudian tahun 1919 didirikan A.M.S. (*Algemeene Middlebare School*). Sekolah ini merupakan lanjutan M.U.L.O. yang lama belajarnya tiga tahun,

Jenis ketiga adalah Universitas, yang terdiri dari tiga sekolah tinggi, yaitu : Kedokteran Batavia 1927, ITB 1920, dan *Recht Hoge School*, Jakarta 1924.

2. Pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak pribumi'

Pendirian untuk anak-anak orang Eropa tidaklah mendapat kesulitan karena memakai sistem pendidikan yang telah ada dinegeri Belanda. Di samping itu pula jumlah mereka relatif kecil. Akan tetapi tidaklah demikian halnya dengan sekolah untuk anak-anak pribumi. Karena masyarakat telah lama mengenal sistem pendidikan Islam yakni pesantren. Dan lembaga inilah yang merupakan wadah pendidikan rakyat yang telah berakar kuat di dalam masyarakat.

A. Rencana untuk mendirikan sekolah untuk anak-anak pribumi dengan menggunakan sistem pesantren.

Pemerintah dalam usahanya mendirikan sekolah untuk anak-anak pribumi agar mereka dapat memperbaiki kehidupan kelak di dalam masyarakat tidak dapat mengabaikan peranan lembaga pendidikan yang telah ada. Hal ini ternyata dari sikap Gubernur Jendral Van Der Capellen dalam tahun 1816 memerintahkan kepada para bupati di Jawa untuk mengadakan penyelidikan sistem pesantren, dan seberapa jauh pengaruhnya dalam masyarakat. Menurut Van Der Capellen sebaiknya pendidikan muncul dari masyarakat itu sendiri. Dan jika mungkin agar sistem pendidikan pesantren dilengkapi dengan sistem pendidikan Barat dan dipakai sebagai dasar pendidikan rakyat. (Historisch, 8-9)

Akan tetapi pemerintah tidak dapat melaksanakannya karena dianggap terlalu berat dan sukar, karena di Jawa saja telah berdiri 17.000 buah pesantren. Sedangkan dana untuk anggaran pendidikan rakyat yang disediakan sejak tahun 1848 hanya sebesar f. 25.000 per tahun, terutama untuk mendidik anak-anak pegawai. (Encyclopaedie, 108.)

Langkah lanjut untuk pengembangan pendidikan rakyat ialah menyiapkan tenaga guru, maka dalam tahun 1851 didirikan sekolah guru yang pertama di Sukarta dan dalam tahun

1866 didirikan di Bandung. Untuk daerah di luar Jawa sekolah guru yang pertama didirikan di Bukit Tinggi (*Ford de kock*) dalam tahun 1856.

Dan sejalan dengan usaha pemerintah untuk pengembangan pendidikan rakyat dengan biaya yang sangat terbatas, maka pemerintah dalam tahun 1849 mengizinkan berdirinya sekolah-sekolah swasta, kemudian dalam tahun 1874 pemerintah memberikan subsidi tetapi hanya diberikan pada lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh Zending, sedangkan untuk lembaga pendidikan Islam tidak mendapat subsidi.

Sikap berat sebelah ini dianggap tidak adil oleh Verkerk, Pistorius, inspektur honorair, karena rakyat yang beragama Islam juga membayar pajak untuk sekolah Zending, maka pesantren juga berhak mendapat subsidi. Jika biaya terlalu besar untuk itu, maka sebaiknya diadakan penggabungan antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan Barat. Penolakan untuk kedua kalinya terhadap pemikiran untuk mengangkat sistem pesantren dengan menggabungkan dengan pendidikan Barat sebagai dasar pendidikan rakyat. Akan tetapi mentri Koloni Mr. L.W. Ch. Keuchenius menyetujui pemberian subsidi untuk sekolah yang berdasarkan agama Islam disekitar tahun 1890, karena dianggap disamping mengajarkan agama juga menyelenggarakan usaha-usaha kemasyarakatan.

Dengan demikian ternyata bahwa lembaga pendidikan Islam sebagai wadah pendidikan masyarakat secara tidak langsung diakui oleh pemerintah Belanda, hanya saja usaha penyempurnaanya untuk dapat dipakai sebagai dasar pendidikan rakyat tidak ada kesepakatan. Dan hal ini pulalah kiranya yang mungkin menyebabkan lembaga pendidikan Islam dapat mempertahankan bentuk aslinya.

B. Hasil perkembangan sistem sekolah untuk anak-anak pribumi sekitar tahun 1920.

Adanya pembatasan pendidikan untuk golongan Eropa dan pribumi dirasakan sebagai sikap yang kurang adil menurut mentri Koloni Fransenvan de Putten dan Direktur Pendidikan, Agama dan Industri Van der Chijs. Kempatan untuk memasuki sekolah Eropa harus juga diberikan pada masyarakat pribumi. Kedua tokoh ini mendesak kepada pemerintah pusat yang kemudian mendapat persetujuan raja yaitu dengan keluarnya Koninklijk Besluit dalam tahun 1864. Dengan keluarnya putusan ini maka kesempatan untuk mendapat pendidikan Barat bagi masyarakat terbuka. (Historisch, 43-45)

Putusan ini rupanya hanya berlaku diatas kertas saja karena pada pelaksanaannya timbul perdebatan. Dari pihak kepala-kepala sekolah ada keberatan dengan alasan tidak cukup biaya untuk penambahan gedung dan merendahkan kedudukan anak-anak Eropa, juga menambah beban guru. (Historisch, 43-45)

Dalam tahun 1893 ditetapkan sekolah untuk anak-anak pribumi terdiri atas dua bagian yakni sekolah kelas satu untuk anak-anak dari keluarga bangsawan dan berada, dan sekolah kelas dua untuk anak-anak dari masyarakat biasa. Baik pada sekolah kelas satu maupun pada sekolah kelas dua bahasa Belanda tidak dianjurkan. Umumnya lama belajar lima tahun untuk sekolah kelas satu, dan dua tahun untuk sekolah kelas dua. Tujuan utama dari sekolah kelas dua adalah melengkapi keperluan pendidikan rakyat di pedesaan.

Terjadinya perubahan pandangan politik negeri Belanda memberikan udara cerah dalam pendidikan di Indonesia, yaitu dengan munculnya Politik Etis yang disuarakan oleh Van Deventer yang disebut juga politik Asosiasi. Agar rakyat Indonesia dapat juga menikmati kemajuan Barat dan disamping itu dapat mempertahankan kepribadian sendiri seperti adat dan kesenian.

Dalam tahun 1900 tampil Direktur Pendidikan, Agama dan Industri Abendanon sebagai salah seorang pembela Politik Etis yang menghendaki agar sekolah Barat terbuka untuk pribumi. Sebenarnya ide untuk meniadakan perbedaan kelas Barat dan kelas pribumi di

dalam dunia persekolahan telah menjadi permasalahan pokok sejak awal abad ke 18. Untuk menampung keinginan ini pemerintah harus memikirkan wadah pendidikan untuk memungkinkan realisasinya seperti didirikannya H.I.S. sebagai pengganti sekolah kelas satu dan sekolah desa untuk pengganti sekolah kelas dua kemudian sekolah Schakel sebagai lanjutan dari sekolah desa, juga ada perkembangan baru disekolah menengah.

H.I.S. (*Hollandsche Indische School*)

Dengan terbukanya kesempatan memasuki sekolah dasar Barat bagi anak-anak pribumi, maka berarti mereka dapat memasuki E.L.S. Kesulitan yang timbul adalah penampungan bagi mereka karena harus mengeluarkan biaya relatif besar dan pengetahuan bahasa Belanda. Di E.L.S. bahasa pengantar adalah bahasa Belanda.

Oleh Abendanon masalah bahasa inilah dianggap sebagai jurang pemisah dan menyarankan pemerintah membuka kursus bahasa Belanda untuk anak-anak pribumi, karena dianggap usaha swasta masih belum memadai. Pemerintah Belanda tidak dapat memperkenankan usul tersebut walaupun mungkin dianggap baik karena terbentur dalam masalah biaya. Oleh karena itu, penanggulangan masalah ini dipercayakan kepada swasta. Dan sikap ini bertentangan dengan ide Abendanon. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda ialah dengan memasukkan pelajaran bahasa Belanda di sekolah kelas satu. Dalam tahun 1914 sekolah kelas satu dileburkan menjadi H.I.S. tujuh tahun.

Dengan berdirinya H.I.S., maka masalah bahasa Belanda sebagai jurang pemisah dapat ditutup. Jalan untuk menuju tingkat yang lebih tinggi terbuka, walaupun pada awalnya masih terbatas pada golongan tertentu.

III. Sekolah untuk Masyarakat Desa

Pendidikan untuk masyarakat desa juga memerlukan perhatian karena jumlah penduduk di pedesaan lebih besar dari pada penduduk di perkotaan. Di pulau Jawad an Madura saja, di sekitar tahun 1906 jumlah anak yang telah memasuki usia sekolah diperkirakan 4,5juta. Untuk anggaran biasa pengajaran sekolah kelas dua diperlukan f. 5.600.000 per tahun. (Encyclopaedie, 108.)

Gubernur Van Heutsz dalam usahanya untuk menanggulangi masalah ini telah mengadakan suatu lembaga baru yang dinamakan sekolah desa (*Volk School*) dalam tahun 1907. Jenis sekolah ini dianggap lebih murah dan sederhana. Pembiayaan dipikul oleh masyarakat desa sendiri. Mayarakat dapat menyediakan dana melalui lumbung desa atau koperasi desa. Dengan demikian, masyarakat dapat melatih diri untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan desanya.

Setelah berdiri sekolah desa maka sekolah kelas dua dilebur didalamnya. Lama belajar sekolah desa 3-4 tahun. Setelah tamat dari sekolah desa, murid-murid dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi yaitu sekolah lanjutan (*Vervolg School*) lama belajar 2-3 tahun. Dengan adanya sekolah lanjutan ini maka diharapkan untuk menjadikan standard pendidikan tunduh enam tahun tahap demi tahap akan tercapai. (S.L. van der Wal, 693) Perkembangan sekolah desa sejak tahun 1907 sampai dengan 1940 terus meningkat.

Sekolah Schakel

Sekolah Schakel didirikan pada tahun 1921. Tujuan dari pendidikan sekolah ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi setelah tamat dari sekolah desa. Ide untuk mengadakan sekolah ini datangnya dari K.F. Creutzberg, Direktur Pendidikan, Agama dan Industri, yang merasakan tidak ada keseimbangan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan dalam memperoleh pengetahuan Barat. Karena disekolah desa tidak diajarkan bahasa Belanda, maka mereka tidak dapat melanjutkan ke sekolah menengah.

Agar sekolah desa mempunyai kesempatan sebagaimana H.I.S. dapat melanjutkan ke Mulo didirikan sebagai percobaan sekolah Schakel. Masa belajar lima tahun, setelah sekolah desa tiga tahun. Jadi, masa belajar seluruhnya delapan tahun dan dianggap setarap dengan H.I.S. tujuh tahun akhirnya menjadi permanen. Peranan sekolah Schakel tidak kecil karena berfungsi sebagai jembatan penghubung antara sekolah desa dengan apa yang disebut pendidik Barat, misalnya pengetahuan bahasa Belanda.

Dengan adanya Schakel maka perbedaan kelas masyarakat untuk memasuki sekolah Barat telah lenyap dan bahasa Belanda yang selama ini dianggap sebagai jurang pemisah telah berhasil dijembatani.

Setelah terbukanya H.I.S untuk anak-anak pribumi maka mereka dapat melanjutkan ke sekolah menengah, terutama ke M.U.L.O. dan tamatan dari sini dapat memasuki sekolah kejuruan. Dengan demikian, mereka dapat menduduki posisi yang baik di dalam masyarakat dimana sebelumnya diduduki oleh orang Belanda. Kemudian sejak berdirinya A.M.S. sebagai lanjutan dari M.U.L.O. maka kesempatan untuk memasuki Perguruan Tinggi terbuka. Suatu hal yang menguntungkan lagi ialah H.B.S. tiga tahun dianggap sederajat dengan M.U.L.O. maka dengan demikian setelah memiliki ijazah M.U.L.O. dapat memasuki H.B.S. lima tahun. Dengan demikian, dua pintu terbuka untuk memasuki Perguruan Tinggi.

IV. Kesimpulan

Pendidikan formal di Indonesia pertama kalinya dilaksanakan oleh Zending. Pendidikan ini amat terbatas karena mempunyai tujuan untuk membina kader pendeta. VOC tidak mencampuri urusan pendidikan rakyat, kecuali bergerak dalam bidang perdagangan. Kemudian ketika VOC digantikan oleh penguasa kolonial Belanda, pendidikan mendapat perhatian kendati terbatas untuk kalangan masyarakat Belanda dan segelintir golongan bangsawan.

Kemudian di Eropa muncul suatu pandangan baru yang menganggap bahwa Belanda telah mendapat keuntungan besar dari Indonesia. Oleh karena itu, layak pendidikan rakyat mendapat perhatian. Ide ini dikenal dengan "Politik Etis" yang membawa perubahan baru dalam pendidikan. Penguasa Belanda menerapkan model pendidikan Barat di Indonesia, memang untuk pertama kalinya masih ada juga pembatasan bagi murid yang ingin bersekolah. Tetapi hal ini tidak terlalu lama karena ada kesadaran bahwa sekolah berbahasa Belanda perlu juga untuk rakyat biasa. Tentu saja hal ini tidak mudah untuk mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, didirikanlah sekolah Schakel sebagai transformator menuju sekolah yang berbahasa Belanda, seperti H.I.S., kemudian sekolah-sekolah tinggi pun dibuka. Hal ini merupakan langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algemen Verslag het Inlandsch Onderwijs in Ned. Indie, loopende over de Jaren 1893-1897
K.F. Creutsberg. Het Onderwijs in Ned. Indie
Historisch Overzicht van het Regeringsbeleid, jilid 1
Encyclopaedie van Ned. Indie, bag. Ke V
Historisch Overzicht, jilid II
Encyclopaedie van Ned. Indie, bag. Ke III
Historisch Overzicht, jilid II
S.L. van der Wal, Het Onderwijsbeleid in Ned. Indie